

Menjadi Istri Menjadi Feminis: Geografi Moral, Sensibilitas Etis, dan Agensi Liminal dalam Rumah Tangga Patriarkal

Roehana Rofaidatun Umroh
Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)
roehanabhb@gmail.com

Abstract:

This article examines the experiences of women with feminist commitments who live within patriarchal marriages, focusing on the dynamics of moral, emotional, and social negotiation in everyday life. The study departs from a critique of binary approaches that tend to position women either as passive victims of patriarchal domination or as subjects of resistance against gender structures. Drawing on a qualitative approach based on in-depth interviews, the article analyzes the experiences of feminist women in negotiating domestic expectations, household power relations, and social pressures surrounding gender propriety after marriage. To interpret these experiences, the study employs three interconnected analytical frameworks: moral geography, ethical sensibility, and liminal agency. It argues that feminist women in patriarchal marriages neither fully submit to nor entirely resist patriarchal norms. Rather, they inhabit a liminal space in which they navigate everyday life through practices of compromise, performative compliance, emotional diplomacy, and subtle forms of resistance within the domestic sphere. The experiences of women in patriarchal marriages reveal subjectivity as a dynamic and complex process of becoming, one that is best understood through an analytical

approach capable of capturing the interconnections between moral space, affective experience, and everyday practices of agency.

Keywords: *feminism, patriarchy, moral geography, ethical sensibility, liminal agency, marriage*

Abstrak:

Artikel ini membahas pengalaman perempuan berideologi feminis yang hidup dalam perkawinan patriarkal dengan menekankan dinamika negosiasi moral, emosional, dan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Studi ini berangkat dari kritik terhadap pendekatan biner yang cenderung memosisikan perempuan semata sebagai korban dominasi patriarki atau subjek resistansi terhadap struktur gender. Melalui pendekatan kualitatif berbasis wawancara mendalam, artikel ini menganalisis pengalaman perempuan feminis dalam menghadapi ekspektasi domestik, relasi kuasa rumah tangga, serta tekanan sosial mengenai kepantasan gender setelah menikah. Untuk membaca pengalaman tersebut, artikel ini menggunakan tiga kerangka analitis yang saling berkaitan, yaitu geografi moral, sensibilitas etis, dan agensi liminal. Artikel ini berpendapat bahwa perempuan feminis dalam perkawinan patriarkal tidak sepenuhnya tunduk ataupun sepenuhnya melawan, melainkan bergerak dalam wilayah ambang melalui praktik kompromi, kepatuhan performatif, diplomasi emosional, dan resistansi halus dalam kehidupan domestik. Pengalaman perempuan dalam perkawinan patriarkal merupakan proses pembentukan subjektivitas yang dinamis dan kompleks, sehingga perlu dipahami melalui pendekatan yang mampu membaca keterkaitan antara ruang moral, pengalaman afektif, dan praktik agensi sehari-hari.

Kata kunci: *feminisme, patriarki, geografi moral, sensibilitas etis, agensi liminal, perkawinan*

Pendahuluan

Perkawinan dalam masyarakat patriarkal tidak hanya merupakan institusi sosial yang mengatur relasi antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga menjadi arena produksi dan reproduksi nilai-nilai gender. Dalam banyak konteks sosial, perkawinan masih dipahami melalui kerangka normatif yang menempatkan laki-laki sebagai pusat otoritas

domestik, sementara perempuan diasosiasikan dengan peran-peran pelayanan, pengasuhan, dan penjaga harmoni keluarga.¹ Konstruksi tersebut menghadirkan seperangkat ekspektasi moral mengenai bagaimana seorang istri seharusnya bersikap, berbicara, bekerja, hingga menempatkan dirinya di hadapan suami dan keluarga besar. Dalam konteks demikian, perempuan yang memiliki kesadaran feminis sering kali menghadapi situasi yang kompleks ketika memasuki kehidupan perkawinan.

Perempuan feminis membawa gagasan tentang kesetaraan relasi, otonomi tubuh, kebebasan menentukan pilihan hidup, serta kritik terhadap subordinasi gender.² Namun, ketika nilai-nilai tersebut berhadapan dengan budaya patriarki dalam kehidupan rumah tangga, muncul berbagai bentuk ketegangan antara idealitas ideologis dan realitas sosial sehari-hari. Ketegangan tersebut tidak selalu tampil dalam bentuk konflik terbuka, melainkan sering hadir secara subtil melalui pembagian kerja domestik, ekspektasi emosional, relasi kuasa dalam pengambilan keputusan, hingga pengawasan moral terhadap tubuh dan

¹ Gerda Lerner, *The Creation of Patriarchy* (New York: Oxford University Press, 1986), 212–239; Nancy Chodorow, *The Reproduction of Mothering: Psychoanalysis and the Sociology of Gender* (Berkeley: University of California Press, 1978), 178–209; Pierre Bourdieu, *Masculine Domination*, trans. Richard Nice (Stanford, CA: Stanford University Press, 2001), 1–34; Arlie Russell Hochschild and Anne Machung, *The Second Shift: Working Families and the Revolution at Home* (New York: Viking, 1989), 3–22.

² Simone de Beauvoir, *The Second Sex*, trans. Constance Borde and Sheila Malovany-Chevallier (New York: Alfred A. Knopf, 2010), 283–334; bell hooks, *Feminism Is for Everybody: Passionate Politics* (Cambridge, MA: South End Press, 2000), 1–18; Judith Butler, *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity* (New York: Routledge, 1990), 1–34; Marilyn Friedman, *Autonomy, Gender, Politics* (Oxford: Oxford University Press, 2003), 3–27.

perilaku perempuan. Akibatnya, perempuan feminis dalam perkawinan patriarkal kerap hidup dalam ruang ambivalen: di satu sisi ingin mempertahankan prinsip-prinsip kesetaraan, tetapi di sisi lain juga harus bernegosiasi dengan tuntutan budaya, agama, keluarga, dan stabilitas relasi rumah tangga.

Kajian mengenai perempuan dan patriarki selama ini cenderung bergerak pada dua kecenderungan utama. Pertama, kajian yang melihat perempuan terutama sebagai korban struktur patriarki yang mengalami subordinasi dan domestikasi dalam institusi perkawinan.³ Kedua, kajian yang menekankan resistansi perempuan terhadap dominasi patriarki melalui bentuk-bentuk perlawanan dan emansipasi.⁴ Meskipun penting, dua pendekatan tersebut sering kali menghasilkan pembacaan yang terlalu biner antara dominasi dan resistansi, tunduk dan melawan. Padahal, pengalaman perempuan dalam kehidupan sehari-hari sering berada di wilayah yang lebih cair, ambigu, dan negosiatif.⁵

Studi ini berangkat dari asumsi bahwa perempuan feminis dalam ruang perkawinan patriarkal tidak dapat dipahami semata-mata sebagai subjek yang tertindas ataupun subjek yang sepenuhnya bebas. Mereka

³ Gerda Lerner, *The Creation of Patriarchy* (New York: Oxford University Press, 1986), 212–239; Simone de Beauvoir, *The Second Sex*, trans. Constance Borde and Sheila Malovany-Chevallier (New York: Alfred A. Knopf, 2010), 283–334.

⁴ Bell Hooks, *Feminism Is for Everybody: Passionate Politics* (Cambridge, MA: South End Press, 2000), 1–18; Judith Butler, *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity* (New York: Routledge, 1990), 1–34.

⁵ Saba Mahmood, *Politics of Piety*, 14–39; Sherry B. Ortner, *Anthropology and Social Theory: Culture, Power, and the Acting Subject* (Durham, NC: Duke University Press, 2006), 129–153.

hidup dalam situasi liminal,⁶ yakni ruang antara yang mempertemukan berbagai tuntutan moral dan identitas sosial secara bersamaan. Dalam situasi tersebut, perempuan mengembangkan berbagai strategi negosiasi untuk mempertahankan dirinya tanpa harus sepenuhnya keluar dari struktur sosial yang mengitarinya.⁷ Oleh karena itu, pengalaman perempuan feminis dalam perkawinan perlu dipahami melalui pendekatan yang mampu membaca dimensi ruang moral, pengalaman afektif, dan praktik agensi secara simultan.

Untuk menganalisis persoalan tersebut, studi ini menggunakan tiga kerangka konseptual yang saling berkaitan, yaitu geografi moral,⁸ sensibilitas etis,⁹ dan agensi liminal.¹⁰ Geografi moral digunakan untuk menjelaskan bagaimana ruang domestik dan sosial membentuk batas-batas kepantasan gender dalam kehidupan perkawinan. Sensibilitas etis digunakan untuk memahami bagaimana batas-batas moral tersebut dirasakan, diinternalisasi, dan dinegosiasikan oleh perempuan dalam pengalaman tubuh dan emosinya sehari-hari. Sementara itu, konsep agensi liminal digunakan untuk membaca bagaimana perempuan

⁶ Victor Turner, *The Ritual Process: Structure and Anti-Structure* (Chicago: Aldine Publishing, 1969), 94–130.

⁷ Lila Abu-Lughod, “The Romance of Resistance: Tracing Transformations of Power Through Bedouin Women,” *American Ethnologist* 17, no. 1 (1990): 41–55.

⁸ David M. Smith, *Moral Geographies: Ethics in a World of Difference* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2000), 1–24.

⁹ Michael Lambek, ed., *Ordinary Ethics: Anthropology, Language, and Action* (New York: Fordham University Press, 2010), 1–38; Didier Fassin, ed., *A Companion to Moral Anthropology* (Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2012), 1–17.

¹⁰ Victor Turner, *The Ritual Process: Structure and Anti-Structure* (Chicago: Aldine Publishing, 1969); Annisa Fitri Amaliah, “Geografi Moral Perempuan Jamaah Tabligh di Bandung Indonesia,” Disertasi (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2026).

bergerak di antara berbagai tuntutan moral yang saling bertentangan tanpa sepenuhnya melebur ke salah satunya.

Dengan menggunakan ketiga kerangka tersebut, studi ini berupaya menunjukkan bahwa pengalaman perempuan feminis dalam perkawinan patriarkal merupakan proses negosiasi yang dinamis dan berlapis. Agensi perempuan tidak selalu hadir dalam bentuk perlawanan terbuka terhadap patriarki, tetapi juga muncul melalui strategi kompromi, adaptasi, kepatuhan performatif, dan negosiasi keseharian yang subtil. Dalam konteks ini, perkawinan bukan hanya ruang domestik yang mereproduksi dominasi patriarki, tetapi juga arena di mana perempuan secara terus-menerus membentuk, merundingkan, dan mengelola subjektivitas dirinya di tengah tekanan moral dan sosial yang kompleks.

Metode

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif fenomenologis interpretatif untuk memahami pengalaman hidup perempuan yang mengidentifikasi diri sebagai feminis dalam menjalani kehidupan perkawinan di tengah budaya patriarki. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak bertujuan mengukur tingkat kesetaraan gender ataupun menguji hubungan kausal antarvariabel, melainkan memahami bagaimana perempuan memaknai pengalaman, emosi, serta praktik-praktik negosiasi yang mereka lakukan dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari. Fokus studi diarahkan pada pengalaman subjektif (*lived experience*) perempuan ketika nilai-nilai feminisme berhadapan

dengan ekspektasi sosial mengenai peran sebagai istri dalam masyarakat patriarkal.

Data studi ini diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) terhadap delapan perempuan yang mengidentifikasi dirinya sebagai feminis dan telah menjalani kehidupan perkawinan dengan mengambil fokus lokasi di Yogyakarta. Informan dipilih secara *purposive* berdasarkan beberapa kriteria, yaitu memiliki pengalaman hidup dalam perkawinan, secara sadar mengafirmasi nilai-nilai kesetaraan gender atau feminisme dalam kehidupan sehari-hari, serta bersedia merefleksikan pengalaman domestiknya secara terbuka. Untuk menjaga kerahasiaan identitas, seluruh nama informan dalam artikel ini disamarkan.

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan memberikan ruang bagi informan untuk mengembangkan narasi mengenai pengalaman mereka terkait pembagian kerja domestik, pengambilan keputusan dalam keluarga, relasi dengan pasangan dan keluarga besar, pengelolaan emosi, serta berbagai bentuk negosiasi yang dilakukan dalam mempertahankan nilai-nilai kesetaraan di tengah ekspektasi patriarkal. Seluruh wawancara direkam atas persetujuan informan, kemudian ditranskripsikan secara verbatim sebagai bahan analisis.

Analisis data dilakukan secara tematik-interpretatif melalui beberapa tahapan, yaitu membaca transkrip secara berulang, melakukan proses pengodean (*coding*) terhadap pengalaman-pengalaman yang berulang, mengelompokkan kode ke dalam tema-tema utama, dan menafsirkan tema tersebut menggunakan kerangka konseptual geografi moral, sensibilitas etis, dan agensi liminal. Untuk meningkatkan

kredibilitas temuan, studi ini menerapkan proses reflektivitas selama analisis dengan terus membandingkan narasi antar-informan serta mendialogkannya dengan literatur mengenai feminisme, antropologi moral, dan studi tentang agensi perempuan. Pendekatan ini memungkinkan pengalaman perempuan tidak dibaca secara biner sebagai bentuk kepatuhan atau resistansi terhadap patriarki, melainkan sebagai praktik-praktik negosiasi yang berlangsung dalam ruang moral yang kompleks.

Antara Dominasi Patriarki, Resistansi Feminis, dan Agensi Liminal

Kajian mengenai perempuan dalam institusi perkawinan patriarkal selama ini berkembang dalam sejumlah pendekatan teoritis yang sering kali saling berdebat. Perdebatan tersebut terutama berkaitan dengan bagaimana posisi perempuan dipahami: apakah perempuan merupakan korban dominasi struktur patriarki,¹¹ subjek resistansi yang melawan ketimpangan gender,¹² atau aktor sosial yang bergerak secara ambigu di antara keduanya.¹³ Dalam konteks perempuan feminis yang hidup dalam perkawinan patriarkal, perdebatan ini menjadi penting karena

¹¹ Gerda Lerner, *The Creation of Patriarchy* (New York: Oxford University Press, 1986), 212–239; Simone de Beauvoir, *The Second Sex*, trans. Constance Borde and Sheila Malovany-Chevallier (New York: Alfred A. Knopf, 2010), 283–334.

¹² Bell Hooks, *Feminism Is for Everybody: Passionate Politics* (Cambridge, MA: South End Press, 2000), 1–18; Judith Butler, *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity* (New York: Routledge, 1990), 1–34.

¹³ Sherry B. Ortner, *Anthropology and Social Theory: Culture, Power, and the Acting Subject* (Durham, NC: Duke University Press, 2006), 129–153.

pengalaman mereka tidak selalu dapat dijelaskan secara memadai melalui pendekatan yang bersifat biner.¹⁴

Pendekatan feminisme struktural melihat perkawinan sebagai institusi yang secara historis dibangun untuk mereproduksi dominasi laki-laki atas perempuan.¹⁵ Dalam perspektif ini, relasi domestik dipahami sebagai arena kerja patriarki melalui pembagian kerja berbasis gender, subordinasi perempuan, kontrol terhadap tubuh perempuan, dan legitimasi otoritas laki-laki dalam keluarga. Pemikir seperti Sylvia Walby menjelaskan bahwa patriarki bekerja melalui institusi sosial, termasuk rumah tangga, yang mempertahankan ketimpangan gender secara sistemik.¹⁶ Dengan demikian, perempuan yang memasuki institusi perkawinan sering dipandang berada dalam posisi yang rentan terhadap domestikasi dan kehilangan otonomi.

Pembacaan struktural ini penting karena mampu memperlihatkan bagaimana ketimpangan gender bekerja secara normal dalam kehidupan sehari-hari. Pengalaman perempuan yang tetap dibebani pekerjaan domestik meskipun bekerja di ruang publik, misalnya, menunjukkan bahwa rumah tangga masih menjadi ruang reproduksi relasi kuasa patriarkal. Akan tetapi, pendekatan ini sering kali dikritik karena cenderung menempatkan perempuan semata-mata

¹⁴ Lila Abu-Lughod, "The Romance of Resistance: Tracing Transformations of Power through Bedouin Women," *American Ethnologist* 17, no. 1 (1990): 41–55; Saba Mahmood, *Politics of Piety: The Islamic Revival and the Feminist Subject* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2005), 14–39.

¹⁵ Sylvia Walby, *Theorizing Patriarchy* (Oxford: Basil Blackwell, 1990), 20–60; Gerda Lerner, *The Creation of Patriarchy* (New York: Oxford University Press, 1986), 212–239.

¹⁶ Sylvia Walby, *Theorizing Patriarchy*.

sebagai korban struktur, sehingga kurang memberi ruang pada kompleksitas pengalaman subjektif perempuan dalam menavigasi kehidupan rumah tangga.

Sebagai respons terhadap pendekatan struktural, muncul perspektif yang lebih menekankan agensi perempuan.¹⁷ Dalam tradisi feminisme liberal maupun feminisme posstrukturalis, perempuan dipandang memiliki kapasitas untuk melakukan resistansi terhadap norma patriarki melalui berbagai bentuk tindakan dan negosiasi identitas. Pemikiran Judith Butler, misalnya, menunjukkan bahwa gender bukan identitas yang tetap, melainkan performativitas yang terus diproduksi dan dapat dinegosiasikan.¹⁸ Dari sudut pandang ini, perempuan feminis dalam perkawinan patriarkal dipahami sebagai subjek yang mampu mengganggu stabilitas norma gender melalui praktik keseharian.

Namun demikian, pendekatan resistansi juga memiliki keterbatasan. Penekanan yang terlalu besar pada kemampuan perempuan untuk melawan sering kali mengabaikan fakta bahwa banyak perempuan hidup dalam relasi emosional, religius, dan sosial yang kompleks. Tidak semua bentuk kompromi dapat dibaca sebagai “kesadaran palsu” ataupun “kegagalan resistansi”. Dalam banyak kasus, perempuan justru melakukan negosiasi yang ambigu: mereka menerima

¹⁷ Judith Butler, *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity* (New York: Routledge, 1990), 1–34; Lois McNay, *Gender and Agency: Reconfiguring the Subject in Feminist and Social Theory* (Cambridge: Polity Press, 2000), 1–27.

¹⁸ Judith Butler, *Gender Trouble*; Judith Butler, *Bodies That Matter: On the Discursive Limits of “Sex”* (New York: Routledge, 1993), 23.

sebagian norma patriarki, tetapi sekaligus menggesernya secara perlahan dalam praktik sehari-hari.

Perdebatan inilah yang kemudian melahirkan perhatian pada bentuk-bentuk agensi yang tidak selalu hadir sebagai resistansi terbuka. Pemikiran Saba Mahmood menjadi salah satu titik penting dalam pergeseran ini. Mahmood mengkritik kecenderungan feminisme liberal yang selalu memahami agensi sebagai tindakan perlawanan terhadap dominasi.¹⁹ Dalam penelitiannya tentang gerakan perempuan Muslim di Mesir, ia menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap norma agama tidak selalu berarti ketundukan pasif, tetapi dapat menjadi cara perempuan membentuk subjektivitas moralnya sendiri. Dengan demikian, agensi perlu dipahami secara lebih luas sebagai kapasitas bertindak dalam struktur tertentu, termasuk melalui bentuk-bentuk adaptasi, disiplin diri, dan negosiasi moral.

Meskipun demikian, pembacaan Mahmood juga menuai kritik karena dianggap berpotensi terlalu menormalisasi kepatuhan perempuan terhadap struktur patriarki.²⁰ Dalam konteks perkawinan patriarkal, tidak semua bentuk adaptasi dapat dilepaskan dari relasi kuasa yang membatasi pilihan perempuan.²¹ Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan yang tidak hanya membaca perempuan sebagai korban

¹⁹ Saba Mahmood, *Politics of Piety: The Islamic Revival and the Feminist Subject* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2005), 14–39.

²⁰ Lois McNay, *Against Recognition* (Cambridge: Polity Press, 2008), 157–181; Lois McNay, *Gender and Agency: Reconfiguring the Subject in Feminist and Social Theory* (Cambridge: Polity Press, 2000), 1–27.

²¹ Pierre Bourdieu, *Masculine Domination*, trans. Richard Nice (Stanford, CA: Stanford University Press, 2001), 35–67; Judith Butler, *The Psychic Life of Power: Theories in Subjection* (Stanford, CA: Stanford University Press, 1997), 1–30.

maupun agen bebas, tetapi sebagai subjek yang bergerak dalam wilayah ambang antara berbagai tuntutan moral dan sosial.

Pada titik inilah konsep geografi moral, sensibilitas etis, dan agensi liminal menjadi relevan untuk digunakan secara integratif. Geografi moral memungkinkan analisis tentang bagaimana ruang domestik dibentuk oleh norma kepantasan gender yang menentukan perilaku ideal seorang istri.²² Ruang rumah tangga bukan sekadar tempat tinggal, tetapi ruang moral yang mengatur tubuh, emosi, dan relasi sosial perempuan. Dalam ruang tersebut, perempuan feminis menghadapi berbagai bentuk pengawasan sosial yang menentukan batas antara “istri baik” dan “perempuan yang dianggap menyimpang”.

Sementara itu, sensibilitas etis membantu menjelaskan bagaimana norma-norma tersebut dihidupi secara afektif oleh perempuan.²³ Perempuan tidak hanya berhadapan dengan aturan sosial secara eksternal, tetapi juga mengalami pergulatan emosional ketika harus menyeimbangkan kesadaran feminis dengan kebutuhan menjaga relasi rumah tangga, legitimasi moral, dan penerimaan sosial. Sensibilitas etis memperlihatkan bahwa tubuh dan emosi perempuan menjadi arena tempat berbagai nilai moral dinegosiasikan secara terus-menerus.

Adapun konsep agensi liminal memungkinkan pembacaan yang lebih cair terhadap praktik perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Perempuan feminis dalam perkawinan patriarkal tidak selalu berada pada posisi melawan ataupun tunduk secara total. Mereka bergerak di

²² David M. Smith, *Moral Geographies: Ethics in a World of Difference*.

²³ Michael Lambek, ed., *Ordinary Ethics*; Didier Fassin, ed., *A Companion to Moral Anthropology*.

wilayah ambang dengan mengembangkan berbagai strategi negosiasi: kepatuhan performatif, kompromi situasional, diplomasi emosional, hingga resistansi halus dalam praktik domestik sehari-hari. Agensi dalam konteks ini bersifat ambigu, fleksibel, dan kontekstual.²⁴

Dengan demikian, penggunaan tiga kerangka tersebut menawarkan pembacaan yang lebih kompleks terhadap pengalaman perempuan feminis dalam perkawinan patriarkal. Geografi moral menjelaskan struktur ruang dan batas kepantasan yang mengitari perempuan; sensibilitas etis menjelaskan bagaimana batas tersebut dirasakan dan diinternalisasi; sedangkan agensi liminal menunjukkan bagaimana perempuan menavigasi batas-batas tersebut dalam praktik kehidupan sehari-hari. Melalui pendekatan ini, perempuan tidak dipahami semata sebagai korban patriarki ataupun subjek resistansi yang sepenuhnya otonom, melainkan sebagai aktor sosial yang terus-menerus merundingkan dirinya dalam ruang moral yang ambigu dan dinamis.

Perkawinan sebagai Ruang Disiplin Gender

Perkawinan dalam budaya patriarki tidak hanya berfungsi sebagai institusi sosial yang mengatur hubungan keluarga, tetapi juga bekerja sebagai ruang disiplin gender yang membentuk, mengontrol, dan menormalisasi perilaku perempuan.²⁵ Setelah menikah, perempuan memasuki ruang moral baru yang dipenuhi ekspektasi mengenai bagaimana seorang istri seharusnya bertindak, berbicara, mengelola

²⁴ Victor Turner, *The Ritual Process: Structure and Anti-Structure*; Annisa Fitri Amaliah, "Geografi Moral Perempuan Jamaah Tabligh di Bandung Indonesia."

²⁵ Sylvia Walby, *Theorizing Patriarchy*; Gerda Lerner, *The Creation of Patriarchy*.

emosi, hingga menempatkan tubuhnya dalam relasi domestik. Dalam konteks ini, perkawinan menjadi arena tempat norma patriarki direproduksi secara halus melalui rutinitas sehari-hari yang tampak wajar dan alamiah.²⁶

Bentuk disiplin gender paling nyata tampak dalam pembagian kerja domestik yang masih dilekatkan terutama kepada perempuan. Meskipun banyak perempuan feminis tetap bekerja di ruang publik, tanggung jawab domestik sering kali tetap dianggap sebagai kewajiban utama mereka. Ayu (33 tahun), seorang pegawai swasta, menceritakan:

“Walaupun saya kerja full time seperti suami, tetap saja yang pertama ditanya kalau rumah berantakan itu saya. Kalau anak sakit, orang otomatis menganggap itu tanggung jawab ibu. Jadi rasanya perempuan itu tidak pernah benar-benar selesai bekerja.”²⁷

Narasi Ayu menunjukkan bagaimana rumah tangga patriarkal bekerja melalui normalisasi peran gender. Kerja domestik dipahami bukan sebagai tanggung jawab bersama, melainkan sebagai kodrat perempuan. Akibatnya, perempuan mengalami beban ganda: bekerja di ruang publik sekaligus memikul tanggung jawab reproduksi domestik. Situasi ini memperlihatkan bahwa disiplin gender tidak selalu hadir dalam bentuk larangan atau kekerasan terbuka, tetapi melalui ekspektasi sosial yang terus diulang dalam kehidupan sehari-hari.

²⁶ Pierre Bourdieu, *Masculine Domination*, trans. Richard Nice (Stanford, CA: Stanford University Press, 2001), 35–67; Candace West and Don H. Zimmerman, “Doing Gender,” *Gender & Society* 1, no. 2 (1987): 125–151.

²⁷ Wawancara dengan Ayu, Yogyakarta, 20 Mei 2026.

Selain pembagian kerja domestik, disiplin gender juga bekerja melalui apa yang sering disebut sebagai *mental load*, yakni beban kognitif dan emosional untuk memastikan rumah tangga berjalan dengan baik.²⁸ Perempuan tidak hanya dituntut melakukan pekerjaan domestik, tetapi juga mengingat, merencanakan, dan mengelola kebutuhan rumah tangga secara terus-menerus. Nisa (30 tahun), seorang dosen, menjelaskan:

“Suami saya sebenarnya mau bantu pekerjaan rumah. Tapi tetap saja saya yang harus mikir semuanya: kapan belanja, anak harus imunisasi, stok dapur habis, jadwal sekolah anak. Jadi yang capek itu bukan cuma fisik, tapi pikiran.”²⁹

Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa patriarki bekerja melalui distribusi tanggung jawab afektif dan mental yang tidak seimbang. Perempuan menjadi pusat pengelolaan domestik, sementara laki-laki sering diposisikan sebagai “membantu”, bukan sebagai subjek yang memiliki tanggung jawab setara. Dalam konteks ini, disiplin gender bekerja melalui pembentukan kesadaran bahwa perempuan secara moral bertanggung jawab atas stabilitas rumah tangga.

Disiplin gender juga tampak dalam pengawasan terhadap tubuh dan perilaku perempuan setelah menikah. Status sebagai istri menghadirkan standar moral tertentu mengenai cara berpakaian, cara berbicara, mobilitas sosial, hingga ekspresi diri perempuan di ruang publik. Laras (29 tahun), seorang pekerja media, mengungkapkan:

²⁸ Allison C. Daminger, “The Cognitive Dimension of Household Labor,” *American Sociological Review* 84, no. 4 (2019): 609–633.

²⁹ Wawancara dengan Nisa, Yogyakarta, 12 Mei 2026.

“Dulu sebelum menikah saya sering pergi sendiri, nongkrong sama teman, atau kerja sampai malam. Tapi setelah menikah, semua jadi berbeda. Bahkan kalau pulang malam karena pekerjaan, selalu ada pertanyaan kenapa istri masih di luar.”³⁰

Dalam pengalaman Laras, perkawinan menjadi titik perubahan identitas sosial perempuan. Tubuh perempuan yang sebelumnya relatif bebas bergerak kini berada dalam pengawasan moral yang lebih ketat. Mobilitas perempuan dipandang bukan lagi semata urusan personal, tetapi terkait dengan kehormatan keluarga dan citra suami. Dengan demikian, tubuh perempuan dalam perkawinan patriarkal menjadi ruang tempat norma kesopanan dan kepatutan diproduksi.

Pengawasan tersebut sering kali tidak hanya datang dari suami, tetapi juga dari keluarga besar dan lingkungan sosial. Dalam banyak kasus, perempuan menghadapi tekanan untuk memenuhi citra “istri baik” dan “menantu ideal”. Siska (34 tahun), seorang guru, menjelaskan:

“Kadang tekanan terbesar bukan dari suami, tapi dari keluarga besar. Misalnya kalau saya terlalu sibuk kerja, pasti ada komentar seperti ‘kasihan suaminya tidak terurus’. Jadi perempuan selalu diukur dari seberapa baik dia melayani keluarga.”³¹

Pernyataan Siska menunjukkan bahwa disiplin gender bekerja secara kolektif melalui jaringan sosial yang lebih luas. Patriarki tidak hanya dipertahankan oleh laki-laki, tetapi juga direproduksi melalui norma keluarga dan komunitas yang mengawasi perilaku perempuan. Dalam konteks ini, perkawinan menjadi ruang geografi moral yang

³⁰ Wawancara dengan Laras, Yogyakarta, 17 Mei 2026.

³¹ Wawancara dengan Siska, Yogyakarta, 12 Juni 2026.

menentukan batas kepantasan perempuan berdasarkan standar domestisitas dan pelayanan.³²

Namun demikian, perempuan feminis tidak sepenuhnya pasif menghadapi disiplin gender tersebut. Banyak di antara mereka mengembangkan strategi negosiasi untuk memperluas ruang otonomi dalam rumah tangga. Strategi tersebut sering kali dilakukan secara halus dan bertahap, bukan melalui perlawanan terbuka. Rani (31 tahun), seorang aktivis sosial, mengatakan:

“Saya sadar kalau langsung menuntut semua harus setara itu malah bikin konflik. Jadi saya memilih mengubah kebiasaan pelan-pelan. Sekarang suami sudah terbiasa berbagi pekerjaan rumah karena saya konsisten membangun itu dari awal.”³³

Pengalaman Rani memperlihatkan bahwa perempuan tidak hanya menjadi objek disiplin patriarki, tetapi juga subjek yang terus berupaya merundingkan posisi dirinya. Dalam situasi demikian, agensi perempuan muncul melalui kemampuan membaca konteks sosial dan mengelola relasi kuasa secara pragmatis.

Dengan demikian, perkawinan sebagai ruang disiplin gender menunjukkan bahwa patriarki bekerja melalui praktik-praktik keseharian yang tampak normal dan natural. Pembagian kerja domestik, beban mental, pengawasan tubuh, serta tuntutan menjadi “istri ideal” merupakan mekanisme yang membentuk subjektivitas perempuan dalam rumah tangga. Akan tetapi, pengalaman perempuan feminis memperlihatkan bahwa ruang domestik bukan hanya arena reproduksi

³² David M. Smith, *Moral Geographies*: 1–24.

³³ Wawancara dengan Rani, 20 Maret 2026.

dominasi, tetapi juga ruang negosiasi yang memungkinkan munculnya berbagai bentuk agensi liminal. Dalam konteks ini, perempuan bergerak di antara kepatuhan, kompromi, dan resistansi secara simultan dalam upaya mempertahankan dirinya di tengah struktur patriarki yang terus bekerja dalam kehidupan sehari-hari.

Tubuh, Emosi, dan Kerja Afektif Perempuan

Dalam perkawinan patriarkal, dominasi gender tidak hanya bekerja melalui pembagian kerja domestik dan struktur otoritas keluarga, tetapi juga melalui pengelolaan tubuh dan emosi perempuan. Rumah tangga menjadi ruang di mana perempuan tidak sekadar dituntut menjalankan fungsi domestik, melainkan juga menjalankan kerja afektif (*affective labor*) untuk menjaga stabilitas emosional keluarga. Dalam konteks ini, perempuan feminis sering mengalami ketegangan antara kesadaran kritis terhadap ketimpangan gender dan tuntutan moral untuk tetap menjadi istri yang lembut, sabar, dan penuh pengertian. Dalam hal ini, tubuh dan emosi perempuan menjadi arena penting untuk memahami bagaimana patriarki bekerja secara subtil dalam kehidupan sehari-hari.

Pemikiran Arlie Russell Hochschild membantu menjelaskan bagaimana perempuan dalam rumah tangga menjalankan apa yang disebut sebagai *emotional labor* atau kerja emosional. Hochschild menunjukkan bahwa kerja emosional adalah upaya mengelola perasaan demi memenuhi harapan sosial tertentu.³⁴ Dalam konteks perkawinan, perempuan sering dibebani tanggung jawab untuk menjaga suasana

³⁴ Arlie Russell Hochschild, *The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling*, updated ed. (Berkeley: University of California Press, 2003), 7–8.

emosional keluarga tetap stabil: meredam konflik, menghibur pasangan, mengelola ketegangan rumah tangga, hingga memastikan kenyamanan emosional anggota keluarga lain. Kerja ini sering kali tidak terlihat sebagai “kerja” karena dianggap sebagai bagian alami dari feminitas dan kasih sayang perempuan.

Hal tersebut tampak dalam pengalaman Mila (32 tahun), seorang konsultan pendidikan:

“Kadang saya sedang lelah sekali, tapi tetap harus terlihat tenang supaya rumah tidak tegang. Kalau saya marah atau terlalu tegas, langsung dianggap emosional atau tidak dewasa sebagai istri.”³⁵

Pengalaman Mila menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya bekerja secara fisik dalam rumah tangga, tetapi juga secara emosional. Patriarki membentuk standar moral bahwa perempuan ideal adalah perempuan yang mampu mengontrol emosinya demi kenyamanan orang lain. Dalam perspektif Hochschild, perempuan seperti Mila menjalankan kerja emosional yang terus-menerus, bahkan ketika hal tersebut mengorbankan kondisi psikologisnya sendiri. Emosi perempuan akhirnya menjadi bagian dari kerja domestik yang tidak dibayar dan jarang diakui.

Selain kerja emosional, perempuan feminis juga sering mengalami apa yang disebut Hochschild sebagai “beban ganda emosional”, yakni ketika perempuan tidak hanya mengelola emosinya sendiri tetapi juga harus mengelola emosi laki-laki dan stabilitas relasi rumah tangga.³⁶

³⁵ Wawancara dengan Mila, Yogyakarta, 26 Mei 2026.

³⁶ Arlie Russell Hochschild, “Emotion Work, Feeling Rules, and Social Structure,” *American Journal of Sociology* 85, no. 3 (1979): 551–575; Arlie Russell Hochschild, *The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling*; Arlie Russell Hochschild

Dalam banyak kasus, perempuan diposisikan sebagai penanggung jawab harmoni keluarga. Karena itu, kemarahan perempuan sering dianggap mengganggu stabilitas domestik, sementara kesabaran dipandang sebagai kualitas ideal seorang istri.

Kondisi tersebut terlihat dalam pengalaman Rere (35 tahun), seorang pegawai negeri sipil:

“Kadang saya memilih diam bukan karena setuju, tapi karena capek kalau harus menjelaskan terus tentang kesetaraan. Ada titik di mana perempuan akhirnya lebih banyak mengalah supaya rumah tetap tenang.”³⁷

Diam dalam pengalaman Rere bukan sekadar sikap pasif, melainkan bentuk kerja emosional yang bertujuan menjaga keseimbangan relasi. Perempuan menanggung kelelahan afektif karena harus terus mengelola konflik tanpa merusak citra dirinya sebagai istri yang baik. Dengan demikian, patriarki bekerja melalui ekspektasi bahwa perempuan bertanggung jawab terhadap kenyamanan emosional rumah tangga.

Sementara itu, pemikiran Sara Ahmed membantu menjelaskan bagaimana emosi tidak bersifat personal semata, tetapi terikat pada norma sosial dan politik tertentu. Ahmed melihat emosi sebagai sesuatu yang “melekat” pada tubuh melalui relasi sosial, sehingga rasa malu, bersalah, takut, atau bahagia diproduksi oleh tatanan sosial yang

and Anne Machung, *The Second Shift* (New York: Viking, 1989), 159–181; Candace West and Don H. Zimmerman, “Doing Gender,” *Gender & Society* 1, no. 2 (1987): 125–151.

³⁷ Wawancara dengan Rere, Yogyakarta, 12 Mei 2026.

mengelilingi individu.³⁸ Dalam konteks perkawinan patriarkal, perempuan dibentuk untuk merasa bertanggung jawab secara emosional terhadap rumah tangga, sehingga mereka mengalami rasa bersalah ketika dianggap gagal memenuhi ekspektasi domestik.

Hal ini tampak dalam pengalaman Hana (30 tahun), seorang peneliti:

“Kalau saya memilih istirahat daripada memasak, ada rasa bersalah yang muncul sendiri. Padahal saya tahu secara rasional pekerjaan rumah harusnya dibagi. Tapi sejak kecil perempuan memang dibentuk untuk merasa bertanggung jawab atas rumah.”³⁹

Melalui perspektif Ahmed, rasa bersalah yang dialami Hana bukanlah emosi yang muncul secara alami, melainkan hasil dari proses sosial yang melekatkan identitas perempuan dengan tanggung jawab domestik. Emosi bekerja sebagai mekanisme moral yang membuat perempuan mengawasi dirinya sendiri. Dengan demikian, patriarki tidak hanya bertahan melalui kontrol eksternal, tetapi juga melalui pembentukan sensibilitas afektif yang membuat perempuan merasa “tidak nyaman” ketika keluar dari norma gender.

Ahmed juga menjelaskan bahwa emosi membentuk orientasi tubuh terhadap ruang sosial tertentu. Dalam budaya patriarki, tubuh perempuan diarahkan untuk selalu dekat dengan ruang domestik dan relasi pelayanan. Sebaliknya, perempuan yang terlalu bebas bergerak di

³⁸ Sara Ahmed, *The Cultural Politics of Emotion*, 2nd ed. (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2014), 1–19.

³⁹ Wawancara dengan Hana, Yogyakarta, 12 Mei 2026.

ruang publik sering dipandang melampaui batas kepantasan.⁴⁰ Pengalaman Nadia (28 tahun), seorang pekerja kreatif, memperlihatkan hal tersebut:

“Dulu saya bebas berpakaian sesuai kenyamanan saya. Setelah menikah, ada komentar-komentar halus seperti ‘sekarang sudah jadi istri orang’. Lama-lama saya merasa tubuh saya bukan lagi milik saya sendiri.”

Komentar sosial tersebut menunjukkan bagaimana tubuh perempuan menjadi objek moralitas sosial setelah menikah. Dalam pembacaan Ahmed, emosi malu dan rasa tidak nyaman bekerja untuk mengarahkan tubuh perempuan kembali pada norma kepatutan patriarkal. Tubuh perempuan akhirnya menjadi ruang tempat norma sosial, afeksi, dan kuasa saling berkelindan.

Meski demikian, perempuan feminis tidak selalu menerima kerja afektif tersebut secara pasif. Banyak di antara mereka mengembangkan strategi emosional untuk mempertahankan ruang otonomi dalam relasi domestik. Strategi tersebut dapat berupa negosiasi halus, komunikasi emosional, kompromi situasional, hingga pengelolaan ekspresi diri secara selektif. Diah (33 tahun), seorang dosen, menjelaskan:

“Saya sadar kalau semua dibawa sebagai perdebatan ideologis malah melelahkan. Jadi saya lebih memilih membangun pengertian pelan-pelan lewat keseharian.”⁴¹

Pengalaman Diah menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya menjadi objek kerja emosional, tetapi juga subjek yang secara reflektif

⁴⁰ Sara Ahmed, *Queer Phenomenology: Orientations, Objects, Others* (Durham, NC: Duke University Press, 2006), 24.

⁴¹ Wawancara dengan Diah, Yogyakarta, 2 Mei 2026.

mengelola relasi afektif dalam rumah tangga. Dalam konteks ini, agensi perempuan bekerja melalui kemampuan membaca situasi emosional dan mengembangkan strategi bertahan yang tidak selalu bersifat konfrontatif.

Dengan demikian, pemikiran Hochschild dan Ahmed memperlihatkan bahwa patriarki domestik bekerja secara mendalam melalui tubuh dan emosi perempuan. Kerja emosional, rasa bersalah, tuntutan menjaga harmoni, serta pengawasan terhadap tubuh merupakan bagian dari mekanisme sosial yang membentuk subjektivitas perempuan dalam perkawinan. Namun, perempuan feminis tidak sepenuhnya tunduk pada mekanisme tersebut. Mereka terus menegosiasikan emosi, tubuh, dan relasi domestik melalui berbagai bentuk agensi liminal yang ambigu, cair, dan situasional. Dalam konteks inilah tubuh dan emosi menjadi arena utama tempat sensibilitas etis dan praktik agensi perempuan berlangsung secara simultan.

Geografi Moral, Sensibilitas Etis, dan Agensi Liminal

Sepanjang pembahasan dalam studi ini telah memperlihatkan bahwa rumah tangga bekerja sebagai ruang moral yang membentuk orientasi tindakan perempuan. Ekspektasi mengenai pelayanan kepada suami, pembagian kerja domestik, hingga pengelolaan emosi tidak sekadar hadir sebagai aturan sosial, tetapi menjadi batas kepantasan yang terus membentuk pengalaman sehari-hari perempuan feminis.

Perempuan yang memiliki ideologi feminis dan kemudian menikah dengan laki-laki dalam ruang budaya patriarki sering kali memasuki situasi sosial yang kompleks dan ambivalen. Dalam kondisi

ini, pernikahan tidak hanya menjadi relasi personal antara dua individu, melainkan juga menjadi arena negosiasi nilai, kuasa, moralitas, dan identitas gender. Di satu sisi, perempuan feminis membawa kesadaran tentang kesetaraan, otonomi tubuh, kebebasan memilih, dan kritik terhadap dominasi laki-laki. Namun di sisi lain, institusi perkawinan dalam masyarakat patriarkal sering kali dibangun di atas ekspektasi normatif tentang kepatuhan istri, pembagian kerja domestik berbasis gender, serta legitimasi otoritas laki-laki dalam rumah tangga. Ketegangan antara dua horizon nilai inilah yang melahirkan apa yang disebut sebagai agensi liminal. Konsep agensi liminal, sebagaimana diajukan oleh Annisa Fitri Amaliah,⁴² dipahami sebagai kemampuan bertindak dari posisi ambang tanpa meninggalkan orientasi moral yang mereka hayati.

Dalam kerangka ini, geografi moral menjadi titik awal untuk memahami bagaimana ruang sosial perkawinan diatur oleh norma kepantasan tertentu. Rumah tangga dalam budaya patriarki bukanlah ruang netral, melainkan ruang moral yang telah dipenuhi oleh definisi tentang “istri baik”, “perempuan salehah”, “ibu ideal”, dan “kepala keluarga”. Geografi moral tersebut bekerja melalui pengawasan sosial, tradisi keluarga, tafsir agama, hingga ekspektasi komunitas. Seorang perempuan feminis yang memasuki ruang ini akan berhadapan dengan batas-batas moral yang menentukan perilaku apa yang dianggap pantas atau menyimpang. Misalnya, perempuan yang tetap mempertahankan karier, menolak subordinasi domestik total, atau secara terbuka

⁴² Annisa Fitri Amaliah, “Geografi Moral Perempuan Jamaah Tabligh di Bandung Indonesia.”

mengemukakan pendapat kepada suami dapat dipandang sebagai melampaui batas kepatutan feminin dalam kultur patriarki.

Pembacaan ini memperluas temuan Annisa mengenai geografi moral perempuan Jamaah Tabligh. Dalam disertasinya, Annisa menunjukkan bahwa ruang *masturah* menjadi ruang yang membentuk sensibilitas etis melalui pengulangan praktik, sehingga perempuan mampu mengenali secara afektif apa yang dianggap pantas, aman, atau berisiko dalam ruang kesalehan.⁴³ Berbeda dengan ruang *masturah* yang secara eksplisit dibangun sebagai ruang kesalehan, rumah tangga dalam studi ini tidak selalu dipahami sebagai ruang moral oleh para informan. Namun justru dalam keseharian itulah norma patriarki bekerja secara halus. Geografi moral tidak hanya bekerja dalam komunitas religius, tetapi juga dalam institusi keluarga melalui normalisasi peran gender.

Namun batas moral dalam kasus perempuan feminis tidak hanya bekerja pada level struktur sosial, melainkan juga dihayati secara afektif melalui sensibilitas etis. Sensibilitas etis menjelaskan bagaimana perempuan merasakan tekanan moral tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Perempuan feminis dalam perkawinan patriarkal sering mengalami pergulatan batin antara komitmen ideologis terhadap kesetaraan dan kebutuhan untuk menjaga harmoni rumah tangga, penerimaan sosial, atau legitimasi moral sebagai istri. Dalam situasi tertentu, ia mungkin merasa bersalah ketika dianggap terlalu dominan, tetapi di saat yang sama merasa tertekan ketika harus tunduk pada ekspektasi patriarkal. Tubuh dan emosi menjadi arena tempat negosiasi moral itu berlangsung: cara berbicara kepada suami, keputusan tentang pekerjaan

⁴³ Ibid.

domestik, pilihan berpakaian, pola pengasuhan anak, hingga ekspresi seksual menjadi praktik-praktik keseharian yang sarat muatan etis.

Sensibilitas etis ini menunjukkan bahwa perempuan feminis tidak selalu berada dalam posisi resistansi terbuka terhadap patriarki. Banyak di antara mereka justru mengembangkan bentuk-bentuk kompromi, penyesuaian, atau negosiasi yang bersifat situasional. Mereka mungkin menerima sebagian norma domestik, tetapi sekaligus mengupayakan ruang otonomi tertentu. Mereka dapat tampil patuh dalam ruang keluarga besar, namun tetap mempertahankan pengambilan keputusan yang setara dalam ruang privat bersama pasangan. Dalam konteks ini, subjektivitas perempuan tidak dapat dipahami secara biner antara “tunduk” atau “melawan”, sebab pengalaman mereka berada di wilayah antara yang cair dan terus berubah.

Di sinilah konsep agensi liminal menjadi penting. Sebagaimana gagasan tentang agensi liminal, ia merujuk pada kemampuan perempuan untuk bergerak di antara berbagai tuntutan moral yang saling bertentangan tanpa sepenuhnya melebur ke salah satunya. Perempuan feminis dalam perkawinan patriarkal berada dalam posisi ambang: ia tidak sepenuhnya meninggalkan nilai-nilai feminisme, tetapi juga tidak selalu dapat menjalankan ideologi tersebut secara total dalam kehidupan rumah tangga. Agensinya muncul justru melalui kemampuan menavigasi ketegangan tersebut secara pragmatis dan reflektif.

Agensi liminal tampak, misalnya, ketika perempuan memilih strategi negosiasi daripada konfrontasi langsung terhadap dominasi suami. Ia dapat menggunakan bahasa agama, kelembutan emosional, atau diplomasi domestik untuk memperluas ruang kebebasannya.

Dalam beberapa kasus lain, perempuan mungkin secara sadar melakukan “kepatuhan performatif” di hadapan lingkungan sosial, tetapi mempertahankan relasi egaliter di ruang privat. Dalam hal ini, agensi tidak selalu hadir dalam bentuk perlawanan frontal, melainkan sering bekerja secara halus, ambigu, dan situasional.

Lebih jauh, kondisi liminal ini menunjukkan bahwa identitas perempuan feminis setelah menikah bersifat dinamis. Pernikahan dalam budaya patriarki memaksa mereka untuk terus-menerus melakukan penyesuaian terhadap diri, tubuh, emosi, dan keyakinan ideologisnya. Sebagian mungkin mengalami transformasi pandangan, sebagian lain justru memperkuat kesadaran feminisnya setelah mengalami ketimpangan domestik secara langsung. Oleh karena itu, pengalaman perempuan feminis dalam perkawinan patriarkal tidak dapat direduksi sebagai kegagalan feminisme ataupun keberhasilan patriarki, melainkan harus dipahami sebagai proses negosiasi subjektivitas dalam ruang moral yang kompleks.

Berangkat dari kritik terhadap pemahaman liminalitas sebagai fase transisional, temuan Annisa menunjukkan bahwa perempuan Jamaah Tabligh hidup dalam kondisi “di antara” yang berlangsung terus-menerus ketika mereka bergerak antara ruang kesalehan dan ruang sosial. Temuan studi ini memperlihatkan bahwa kondisi liminal juga dialami perempuan feminis, tetapi konfigurasi moralnya berbeda. Mereka tidak berpindah antara ruang religius dan ruang publik, melainkan terus berada di antara komitmen terhadap nilai kesetaraan gender dan ekspektasi patriarki dalam kehidupan perkawinan. Posisi ambang tersebut bukan fase sementara, melainkan kondisi permanen yang harus

dinegosiasikan melalui kompromi, diplomasi emosional, kepatuhan performatif, dan resistansi halus.

Dengan demikian, studi ini memperluas konsep agensi liminal dari konteks kesalehan religius menuju relasi gender dalam institusi perkawinan. Agensi liminal tidak lagi dipahami semata sebagai cara perempuan mempertahankan orientasi kesalehan di tengah pluralitas ruang sosial, tetapi juga sebagai kapasitas etis untuk mempertahankan komitmen feminis sambil tetap mengelola relasi domestik yang dibentuk oleh norma patriarki.

Dengan menggunakan rangkaian analitis geografi moral, sensibilitas etis, dan agensi liminal, dapat dipahami bahwa perkawinan patriarkal bukan sekadar struktur dominasi yang statis, tetapi arena kontestasi makna dan praktik kehidupan sehari-hari. Geografi moral membentuk batas kepantasan gender; sensibilitas etis menjelaskan bagaimana batas tersebut diinternalisasi, dirasakan, dan dinegosiasikan; sementara agensi liminal menunjukkan kapasitas perempuan untuk bergerak di antara berbagai tuntutan moral secara kreatif dan ambigu. Dalam konteks ini, perempuan feminis bukan hanya subjek yang ditundukkan oleh patriarki, tetapi juga aktor yang terus memproduksi strategi hidup di tengah ketegangan antara ideologi kesetaraan dan realitas sosial patriarkal.

Kesimpulan

Artikel ini menunjukkan bahwa pengalaman perempuan feminis dalam perkawinan patriarkal tidak dapat dipahami secara sederhana melalui dikotomi antara dominasi dan resistansi. Kehidupan rumah tangga

dalam budaya patriarki menghadirkan ruang moral yang kompleks, di mana perempuan tidak hanya berhadapan dengan struktur sosial yang mengatur relasi gender, tetapi juga dengan tuntutan afektif, religius, dan sosial yang melekat pada identitas sebagai istri. Dalam konteks tersebut, perempuan feminis hidup dalam situasi liminal: berada di antara komitmen terhadap nilai kesetaraan dan kebutuhan untuk bernegosiasi dengan norma patriarki yang mengatur kehidupan domestik.

Melalui konsep geografi moral, sensibilitas etis, dan konsep agensi liminal artikel ini menegaskan bahwa pengalaman perempuan feminis dalam perkawinan patriarkal merupakan proses pembentukan subjektivitas yang dinamis. Perempuan bukan hanya korban struktur patriarki, tetapi juga aktor sosial yang terus-menerus menciptakan cara hidup, strategi bertahan, dan ruang negosiasi di tengah keterbatasan yang ada. Oleh karena itu, memahami pengalaman perempuan membutuhkan pendekatan yang mampu membaca secara simultan dimensi ruang moral, pengalaman afektif, dan praktik agensi sehari-hari.

Dengan menggunakan ketiga rangkaian konsep tersebut, artikel ini menawarkan perspektif yang lebih cair dan non-biner dalam membaca relasi gender dalam perkawinan. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap kompleksitas pengalaman perempuan, terutama bagaimana mereka menavigasi ketegangan antara ideologi feminisme dan realitas budaya patriarki tanpa harus sepenuhnya tunduk ataupun sepenuhnya keluar dari struktur yang mengitarinya.

Daftar Pustaka

- Abu-Lughod, Lila. "The Romance of Resistance: Tracing Transformations of Power Through Bedouin Women." *American Ethnologist* 17, no. 1 (1990): 41–55.
- Ahmed, Sara. *The Cultural Politics of Emotion*. 2nd ed. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2014.
- . *Queer Phenomenology: Orientations, Objects, Others*. Durham, NC: Duke University Press, 2006.
- Amaliah, Annisa Fitri. *Geografi Moral Perempuan Jamaah Tabligh di Bandung Indonesia*. Disertasi. Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2026.
- Beauvoir, Simone de. *The Second Sex*. Translated by Constance Borde and Sheila Malovany-Chevallier. New York: Alfred A. Knopf, 2010.
- Bourdieu, Pierre. *Masculine Domination*. Translated by Richard Nice. Stanford, CA: Stanford University Press, 2001.
- Butler, Judith. *Bodies That Matter: On the Discursive Limits of "Sex."* New York: Routledge, 1993.
- . *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*. New York: Routledge, 1990.
- . *The Psychic Life of Power: Theories in Subjection*. Stanford, CA: Stanford University Press, 1997.

- Chodorow, Nancy. *The Reproduction of Mothering: Psychoanalysis and the Sociology of Gender*. Berkeley: University of California Press, 1978.
- Daminger, Allison C. "The Cognitive Dimension of Household Labor." *American Sociological Review* 84, no. 4 (2019): 609–633.
- Fassin, Didier, ed. *A Companion to Moral Anthropology*. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2012.
- Friedman, Marilyn. *Autonomy, Gender, Politics*. Oxford: Oxford University Press, 2003.
- Hochschild, Arlie Russell. "Emotion Work, Feeling Rules, and Social Structure." *American Journal of Sociology* 85, no. 3 (1979): 551–575.
- . *The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling*. Updated ed. Berkeley: University of California Press, 2003.
- Hochschild, Arlie Russell, and Anne Machung. *The Second Shift: Working Families and the Revolution at Home*. New York: Viking, 1989.
- hooks, bell. *Feminism Is for Everybody: Passionate Politics*. Cambridge, MA: South End Press, 2000.
- Lambek, Michael, ed. *Ordinary Ethics: Anthropology, Language, and Action*. New York: Fordham University Press, 2010.
- Lerner, Gerda. *The Creation of Patriarchy*. New York: Oxford University Press, 1986.

- Mahmood, Saba. *Politics of Piety: The Islamic Revival and the Feminist Subject*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2005.
- McNay, Lois. *Against Recognition*. Cambridge: Polity Press, 2008.
- . *Gender and Agency: Reconfiguring the Subject in Feminist and Social Theory*. Cambridge: Polity Press, 2000.
- Ortner, Sherry B. *Anthropology and Social Theory: Culture, Power, and the Acting Subject*. Durham, NC: Duke University Press, 2006.
- Smith, David M. *Moral Geographies: Ethics in a World of Difference*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2000.
- Turner, Victor. *The Ritual Process: Structure and Anti-Structure*. Chicago: Aldine Publishing, 1969.
- Walby, Sylvia. *Theorizing Patriarchy*. Oxford: Basil Blackwell, 1990.
- West, Candace, and Don H. Zimmerman. "Doing Gender." *Gender & Society* 1, no. 2 (1987): 125–151.